

Strategi Pembangunan Nasional Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah Perspektif Ekonomi Islam

Taufik Arnanda Marpaung¹, Muhammad Imam Daei², Dorlan Habibi³,
Nurhayati Harahap⁴

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁴ Universitas Al Washliyah Medan.

Korespondensi penulis : taufik120102@gmail.com

Abstract. *Indonesia has a significant problem of economic inequalitytaufik120102@gmail.com between regions. This can give rise to inequality and social injustice. The government, in its efforts to achieve economic equality between regions in its national development strategy, has provided several policies, however, it also needs a national development strategy with an Islamic perspective to perfect these policies. This study employed a qualitative approach as its research methodology, specifically focusing on library research. A qualitative approach allows researchers to understand complex and multidimensional phenomena. In facing the challenges, challenges and failures in the national development strategy in Indonesia in the last 10 years, Islamic Economics can provide alternative solutions that can strengthen the parts that according to Islamic Economics must also be considered in order to strengthen the National Development strategy that can minimize and neutralize, one of which is by paying attention to Sharia Economic Principles in terms of development such as justice, balance and poverty. Therefore, the national development strategy implemented must pay attention to these principles. From the standpoint of Islamic economic development, Indonesia's development focus for the past ten years has been irrelevant. This is a result of the Indonesian government continuing to focused on infrastructure development and is not fully in accordance with sharia principles, and is lacking in improving the aspect of human resources.*

Keyword : *Islamic Economics, National Development, Inter-Regional Economic Inequality*

Abstrak. Indonesia memiliki masalah ketimpangan ekonomi antar daerah yang signifikan. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Pemerintah dalam upaya pemerataan Ekonomi antar daerah dalam strategi Pembangunan nasional telah memberikan beberapa kebijakannya namun, juga perlu strategi pembangunan nasional perspektif Islam untuk penyempurnaan kebijakan tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan penekanan khusus pada penelitian kepustakaan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang kompleks dan multidimensional. Dalam menghadapi hambatan, tantangan, dan kegagalan dalam strategi pembangunan nasional di Indonesia 10 tahun terakhir, Ekonomi Islam dapat memberikan alternatif solusi yang dapat menguatkan bagian-bagian yang menurut Ekonomi Islam harus diperhatikan juga agar memperkuat strategi Pembangunan Nasional yang dapat meminimalisir dan menetralsir, salah satunya dengan Memperhatikan Prinsip Ekonomi Syariah dalam hal pembangunan seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, strategi pembangunan nasional yang diimplementasikan harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Dari sudut pandang pembangunan ekonomi syariah, fokus pembangunan Indonesia selama sepuluh tahun terakhir menjadi tidak relevan. Karena itu, pemerintah Indonesia terus melakukan hal tersebut fokus pada pembangunan infrastruktur dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, serta kurang dalam peningkatan pada aspek sumber daya manusia.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Pembangunan Nasional, Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah

LATAR BELAKANG

Ketimpangan ekonomi antar daerah merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Kesenjangan ekonomi regional dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan menimbulkan ketidakadilan sosial dan masalah keuangan. Oleh karena itu, negara memerlukan kebijakan pembangunan nasional yang efektif. mengatasi ketimpangan perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun belakangan ini terbilang baik, Hal ini terlihat dari pemaparan Bank Indonesia yang memproyeksikan PDB Indonesia akan tumbuh sebesar 4,5-2,3% pada tahun 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,03% (yoy) pada periode pertama. triwulan 2023, sedikit lebih cepat Berbeda dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Pada triwulan II tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,17% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy) (Wibisono 2019).

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, meski perekonomian global sedang melambat Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,03% pada triwulan I tahun 2023. termasuk yang tertinggi di dunia dan merupakan sebuah anomali yang mengejutkan semua pihak, termasuk pemerintah dan para pengamat.

Dari pandangan beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun perekonomian global terpuruk, laju pertumbuhan Indonesia masih tinggi. Menurut perkiraan Menurut Bank Indonesia, PDB Indonesia diproyeksikan tumbuh sebesar 4,5% hingga 5,3% pada tahun 2023. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap konsisten pada kuartal pertama dan kedua 5,03% dan 5,17% (yoy) masing-masing. Selain itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi global tercepat pada kuartal pertama tahun 2023.

Namun di era meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Indonesia ini belum bisa menjadi parameter yang bisa dilihat, bahwasanya Pemerataan Ekonomi antar Daerah sudah terdistribusi dengan baik. Indonesia memiliki masalah ketimpangan ekonomi antar daerah yang signifikan. Daerah-daerah tertentu mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan daerah-daerah lain., sementara yang lain tertinggal dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial.

Permasalahan ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan bagi Indonesia karena kesenjangan antar wilayah masih tinggi. Angka kemiskinan di Indonesia bagian timur sebesar 18,01%, sedangkan di wilayah Indonesia bagian barat dan perkotaan masing-masing sebesar

10,33% dan 7,02%. Sedangkan rasio ketimpangan pendapatan di perdesaan sebesar 0,324 dan di perkotaan sebesar 0,4.

Terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di wilayah tertentu dapat menyebabkan kesenjangan yang semakin besar antar wilayah. Tingginya tingkat ketimpangan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi melalui perubahan pola permintaan dan ukuran pasar. Memastikan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah merupakan merupakan salah satu pendekatan untuk mengatasi masalah ini karena dapat mendorong investasi segar, menghasilkan uang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai dampaknya pergerakan perekonomian lokal

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi pembangunan nasional. Namun, penting untuk mengevaluasi sejauh mana strategi tersebut telah berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah. Dengan mengalihkan sebagian kekuasaan dari pemerintah federal ke pemerintah daerah, desentralisasi sering kali juga dilihat sebagai cara untuk mengelola pertumbuhan perekonomian suatu negara dengan lebih berhasil dan ekonomis.

Berikut ini adalah beberapa strategi yang telah diterapkan pemerintah Indonesia untuk mendorong pembangunan nasional:

1. Pembangunan infrastruktur secara massif
2. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta
3. Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE)
4. Pengembangan kawasan strategis

Untuk mengevaluasi efektivitas strategi-strategi tersebut dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah, pemerintah perlu melakukan evaluasi komprehensif terhadap dampak strategi-strategi tersebut terhadap berbagai indikator seperti pertumbuhan PDB, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan Gini Ratio. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa alokasi sumber daya melalui kebijakan fiskal seperti Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Ambarwati and Supardi 2020)

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah tersebut meliputi keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan pilihan-pilihan pembangunan nasional untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah dari perspektif ekonomi Islam (Nuruddin and MA 2009)

Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip yang unik dalam mengelola sumber daya ekonomi, termasuk zakat, infaq, dan sadaqah yang dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Perspektif ekonomi Islam dapat memberikan pandangan baru dalam mengatasi masalah ini.

Berdasarkan maqashid syariah, ekonomi Islam memperkenalkan empat tujuan utama, yaitu sebagai berikut: memenuhi kebutuhan dasar manusia, meningkatkan kapabilitas manusia, memperbaiki lingkungan hidup, dan memperkuat keadilan sosial (Jajang et al. 2021).

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dalam studi perpustakaan semacam ini. Metode analisis induktif diterapkan pada data yang diperoleh. Kajian ini akan mengkaji kemajuan Indonesia selama sepuluh tahun terakhir dari sudut pandang perkembangan ekonomi syariah. Selain itu, strategi pembangunan nasional yang mengutamakan perbaikan akan dikaji kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia yang kompetitif dan mandiri. (Teguh and Sudiadi 2014)

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan ekonomi antar daerah masih menjadi masalah yang serius. Meskipun pemerintah sudah berupaya keras untuk mengatasi masalah ini, masih banyak daerah yang mengalami keterbelakangan dalam hal pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan nasional yang lebih menekankan pada peningkatan potensi sumber daya manusia yang berdaya saing dan mandiri. Dalam perspektif ekonomi Islam, strategi pembangunan nasional harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, diharapkan strategi pembangunan nasional yang diimplementasikan dapat mengatasi ketimpangan ekonomi antar daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Septiarti et al. 2017)

Penelitian ini penting karena akan memberikan wawasan tentang bagaimana perspektif ekonomi Islam dapat diintegrasikan dalam strategi pembangunan nasional untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Hal ini dapat menjadi landasan untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga dilakukan untuk menganalisis variabel-variabel yang menyebabkan terjadinya disparitas antar wilayah, seperti variasi jumlah sumber daya alam di setiap wilayah, tingkat pendapatan, dan perbedaan tingkat pendidikan

Ketidaksetaraan ekonomi antar daerah juga merupakan masalah global. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman global tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi.

KAJIAN TEORI

1. Pembangunan Nasional

GBHN (Garis Besar Haluan Negara) tahun 1993 yang mendefinisikan pembangunan sebagai gagasan membangun masyarakat Indonesia dan rakyatnya secara kolektif, mendefinisikan ungkapan bahwa paling banyak digunakan di Indonesia sehubungan dengan pasal tersebut. Menurut gagasan pembangunan ini, kemajuan tidak hanya mencakup pencapaian tujuan-tujuan eksternal yang cukup seperti pangan, sandang, papan, atau layanan kesehatan, namun juga berfokus pada tujuan-tujuan internal hal-hal non-fisik seperti pertumbuhan, kebebasan berbicara, keamanan, dan pendidikan. Mewujudkan rasa keadilan seseorang (Indonesian Bank 2015). Sehubungan dengan hal tersebut, GBHN mendefinisikan pembangunan nasional Indonesia sebagai serangkaian inisiatif yang bertujuan untuk mentransformasikan seluruh aspek kehidupan negara, termasuk unsur politik, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya, guna meningkatkan kesejahteraan warga negaranya (Bappenas 2023). Definisi para ahli tentang pembangunan dapat ditemukan jika kita menelusuri sejumlah literatur yang berkaitan dengan pembangunan. Apa yang dimaksud dengan seorang ahli tentang pembangunan dapat ditemukan jika kita menelusuri sejumlah literatur yang berkaitan dengan pembangunan. Meskipun demikian, kesamaan atau kesamaan dalam menjelaskan pembangunan dapat disimpulkan dari beragam definisi ini. Misalnya saja menurut sudut pandang Philips Roupp, pembangunan adalah transisi dari sesuatu yang kurang penting ke sesuatu yang signifikan (pembangunan menunjukkan transisi dari sesuatu yang dianggap kurang diinginkan ke sesuatu yang dianggap lebih diinginkan) (Alizain 2013). Pembangunan menurut SP Siagian adalah suatu usaha atau rangkaian peningkatan yang disengaja dan prakarsa modernisasi yang disengaja yang dilakukan oleh negara, negara bagian, dan pemerintah dalam rangka pembangunan bangsa.

Todaro mengartikan pembangunan memiliki tiga tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan harus meningkatkan akses terhadap pangan, sandang, papan, dan sumber daya kesehatan.
2. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan harga diri bangsa dan individu, pembangunan harus meningkatkan taraf hidup, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pendidikan, dan lebih memperhatikan nilai-nilai budaya dan kemanusiaan.
3. Meningkatkan jangkauan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi setiap orang dan negara, memungkinkan mereka untuk mandiri dari pengampunan dan negara-negara lain juga sebuah bangsa dan individu.

Dari sejumlah pendapat para ahli terlihat jelas bahwa pengertian pembangunan nasional mencakup suatu gagasan yang dinamis dan kompleks yang diterapkan secara sadar, terus-menerus, dan metodis untuk mempengaruhi tidak hanya negara dan negara tetapi juga setiap bidang kehidupan umat manusia. Dengan kata lain, hal ini tidak hanya dipahami dari sudut pandang ekonomi. Kapasitas negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan pendidikan, memberikan kemungkinan kemajuan pribadi di bidang sosial, politik, dan ekonomi, serta meningkatkan harga diri, semuanya akan ditingkatkan melalui pembangunan nasional. Pertumbuhan nasional akan meningkatkan kemampuan di samping meningkatkan kapasitas individu dalam suatu negara bangsa secara keseluruhan dalam menegosiasikan posisi bangsa dengan bangsa lain agar tidak bergantung pada mereka.(Hardiyanto 2021).

2. Ketimpangan Ekonomi

Karena dipengaruhi oleh banyak faktor, ketimpangan ekonomi menjadi permasalahan yang pelik (World Bank 2016). Faktor alam seperti keistimewaan wilayah dan potensi sumber daya alam juga memberikan dampak terhadap ketimpangan selain faktor manusia. Ketimpangan ekonomi terjadi di Indonesia karena ketimpangan pembangunan di seluruh wilayah (Angelia 2010).

Selain satu faktor tersebut, terdapat Ketidakseimbangan perekonomian dipengaruhi oleh sejumlah faktor tambahan, yang sebagian besar saling berhubungan. Faktor-faktor tersebut meliputi ciri fisik suatu wilayah, kondisi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, dan sumber dayanya ekonominya (Suhartono 2015). Setiap daerah di Indonesia mempunyai potensi sumber daya yang berbeda-beda, dan dengan terus meningkatnya ketimpangan ekonomi, (Sayekti 2017)

Berikut beberapa poin penting terkait kondisi ketimpangan ekonomi di Indonesia:

1. Ketimpangan perekonomian di Indonesia semakin meningkat, hal ini terlihat dari rasio Gini yang mencapai 0,388 poin pada Maret 2023, lebih tinggi dibandingkan rasio pada September 2022.
2. Meski angka kemiskinan mengalami penurunan, namun ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin melebar dan mencapai level terburuk dalam lima tahun terakhir pada bulan Maret 2023.
3. Tidak meratanya persebaran penduduk dan PDB di Indonesia mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi(Wibowo 2017).

4. 10% penduduk teratas di Indonesia menyumbang 46,86% terhadap PDB, sedangkan 50% penduduk terbawah hanya menyumbang 12,4% .
5. Sistem ekonomi liberal di Indonesia menyebabkan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi namun juga semakin melebarnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, termasuk pemekaran wilayah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, diperlukan upaya lebih untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. (Yusuf Sukman 2017).

3. Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan volume produk dan jasa yang dihasilkan selama jangka waktu tertentu disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan menggunakan perubahan output suatu negara selama periode waktu tertentu, baik dari segi kuantitas maupun nilai. Variasi pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata penduduk suatu negara juga dapat dimanfaatkan mengukur pertumbuhan ekonomi. (Andika Ika Fahrika, Zulkifli 2020)

Beberapa Ahli Ilmu ekonomi berpendapat, Pertumbuhan ekonomi dalam pandangan Adam Smith merupakan pemeriksaan terhadap keadaan dan sumber kemakmuran suatu bangsa. Ilmu ekonomi, dalam kata-kata N. Gregory Mankiw, adalah studi tentang bagaimana masyarakat mendistribusikan sumber daya yang terbatas. Ibnu Khaldun, bagaimanapun, dikreditkan oleh para ahli ekonomi Islam yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi ketika masyarakat mampu menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dan lebih baik. Syed Nawab Haider Naqvi mendefinisikan kemajuan ekonomi sebagai upaya metodis untuk memahami permasalahan ekonomi dan bagaimana masyarakat berperilaku sehubungan dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.

Pemahaman para ahli tersebut membawa kita pada kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perluasan kapasitas output suatu negara atau wilayah dalam jangka waktu yang telah ditentukan. (Mashdurohatun 2011).

Konsep yang hampir sama digunakan dalam studi ekonomi: pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ditandai dengan pertumbuhan perekonomian seiring dengan perubahan komposisi dan dinamika perekonomian. Terkadang, kedua nama ini digunakan dalam konteks yang hampir sama. Penggunaan kedua nama ini seringkali

mbingungkan. Ambiguitas nomenklatur ini pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan kajian ekonomi karena topik sentralnya akan selalu terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Al- Tariqi (Mubarok 2021) mengutip berbagai argumen yang mendukung pentingnya mengevaluasi kembali teori pertumbuhan ekonomi ini.

Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam Para ahli wacana teori ekonomi Islam klasik telah memberikan pertimbangan yang matang terhadap masalah pertumbuhan ekonomi dalam bidang ekonomi Islam. Pembicaraan ini melenceng dari pesan Allah SWT. Surat Hud ayat 61 menyatakan, “Dialah yang menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu makmur.” Artinya kita sebagai wakil Allah SWT sedang menguburkan tanah tersebut. “Seharusnya perhatian terhadap kesejahteraan bumi lebih besar dari pada orientasi pemungutan pajak,” tegas Ali bin Abi Thalib kepada seorang penguasa Mesir. “Pajak sendiri hanya bisa dioptimalkan dengan kemakmuran bumi,” demikianlah kalimat ini “ kemakmuran bumi” mencakup pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi. Siapa pun yang bertanggung jawab dalam pengumpulan pajak menyadari bahwa negara ini akan hancur jika tidak ada kemakmuran global.” Menurut Islam, kemajuan ekonomi adalah terciptanya komponen-komponen produksi yang tepat guna yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia (Komite Nasional Keuangan Syariah 2019). Oleh karena itu, kemajuan ekonomi merupakan sesuatu yang kaya akan nilai-nilai dalam Islam. Peningkatan Variabel manufaktur, seperti barang-barang yang diketahui berbahaya bagi manusia dan mempunyai dampak negatif, tidak dianggap pertumbuhan ekonomi jika mencakup manufaktur tersebut. Selain itu, perubahan ekonomi merupakan upaya produktif menyeluruh yang memiliki hubungan erat dengan keadilan distributif.

Pertumbuhan mencakup lebih dari sekedar komponen aspek material dan spiritual dalam pembangunan manusia. Dengan kata lain, pendekatan ini mempertimbangkan faktor hukum, sosial, politik, dan budaya di samping komponen ekonomi kehidupan manusia. Dengan cara ini, memajukan dasar-dasar keadilan sosial, kesetaraan, hak asasi manusia, dan martabat manusia adalah tujuan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Islam memandang kemajuan ekonomi memiliki banyak aspek, yang mencakup unsur-unsur kuantitatif dan kualitatif. Bukan hanya kesejahteraan duniawi saja yang menjadi tujuannya, namun juga kesejahteraan akhirat. Islam berpendapat bahwa ada integrasi mendasar antara keduanya. (Jaih Mubarok, Khotibul Umam , Destri Budi Nugraheni and Primandasetio, Kesumawati Syafei 2018)

Menurut al-Tariqi Islam (Mubarok 2021) harus memiliki ciri khas agar tujuan ekspansi ekonomi dapat tercapai. Kualitas-kualitas ini adalah:

1. Komprehensif (al-Syumul); Islam berpandangan bahwa pembangunan merupakan tujuan umum dan bukan sekedar tujuan material, tidak seperti sistem modern yang bertujuan sempit, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Pertumbuhan perlu difokuskan pada nilai dan tujuan. Aspek yang bersifat material, moral, finansial, sosial, dan spiritual tidak dapat dipisahkan. Anda tidak hanya ingin bahagia dan sejahtera di dunia saja, namun Anda juga ingin bahagia di akhirat.
2. Seimbang (Tawazun): Pertumbuhan bertujuan untuk dilandasi prinsip pemerataan yang adil sejalan dengan firman Allah yang menyatakan, “Berlaku adil, sesungguhnya itu yang paling dekat dengan takwa,” di samping peningkatan produksi. (Al-Maidah, Q.S.: 8). Pertumbuhan juga memerlukan inisiatif pertumbuhan yang seimbang. Oleh karena itu, Islam menentang rencana pembangunan, industri yang mengabaikan pertanian, dan program pertumbuhan kota yang mengabaikan kawasan pedesaan yang memprioritaskan percepatan proyek tertentu dengan mengorbankan infrastruktur publik dan kebutuhan lainnya.
3. Realistis (Waqi'iyah): Cara pandang realistis terhadap suatu subjek adalah cara pandang yang sejalan dengan kenyataan. Realisme merupakan prasyarat bagi gagasan-gagasan sosial secara umum, karena gagasan-gagasan utopis yang tidak terhubung dengan keadaan sebenarnya akan menjadi tantangan bagi masyarakat untuk menerimanya. Islam, agama yang berasal dari Allah, tidak mampu menetapkan hukum-hukum ideal yang tidak dapat diterapkan pada manusia dan keadaan mereka. Idealitas Islam adalah realitas, dan Islam realistis adalah idealitas.
4. Keadilan ('Is), Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, keadilan distributif perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan. Allah berfirman: “Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) untuk berbuat adil dan beramal shaleh, memberi kepada sanak saudara, dan Allah mengharamkan kejahatan, zalim dan permusuhan.” Al-Nahl, Q.S., 90. Keadaan saat ini menunjukkan betapa maraknya uang di negeri ini. Ketimpangan ekonomi tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, namun juga terjadi di negara-negara maju yang mendukung kapitalisme, seperti Amerika Serikat. Untuk itu, kesetaraan harus hidup berdampingan dengan kemajuan.
5. Bertanggung Jawab (Mas'uliyah); Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam segala bidang usaha selama Islam menjunjung tinggi hak mereka untuk mengambil bagian dalam kesenangan duniawi; namun kebebasan ini mempunyai keterbatasan. Banyak peraturan yang memastikan semua orang di masyarakat

bahagia dan membatasi kebebasan ini. Kualitas ini terkait dengan persyaratan lain untuk pertumbuhan, yaitu keberlanjutan. Pertimbangan ekologis harus diperhitungkan dalam pertumbuhan, dan semua sumber daya yang tersedia tidak boleh digunakan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan.

6. Kecukupan (Kifayah): Islam tidak hanya menjabarkan sifat-sifat akuntabilitas seperti yang telah diartikulasikan, namun juga mensyaratkan bahwa akuntabilitas bersifat total dan mampu mencakup perwujudan kecukupan umat manusia. Para ahli di bidang hukum telah menyimpulkan bahwa dalam hal ini, mendistribusikan sumber daya sedemikian rupa sehingga, dalam batas wajar, dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
7. Penekanan Ghayatuha al-Insan terhadap manusia bertolak belakang dengan gagasan pembangunan ekonomi kontemporer yang menekankan bahwa lingkungan fisik merupakan domain eksklusif di mana kegiatan pembangunan berlangsung. Islam memperluas cakupan item pembangunan dari alam hingga mencakup manusia. Islam memberikan banyak perhatian pada topik ekspansi ekonomi, namun mereka masih melihatnya sebagai bagian dari isu pembangunan manusia yang lebih besar. Tujuan utama Islam adalah mengarahkan manusia ke arah dan jalan yang benar. Kemajuan umat manusia secara keseluruhan harus terjalin dengan semua aspek kemajuan ekonomi.

METODOLOGI PENELITIAN

Teknik penelitian yang digunakan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. sejalan dengan metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif karena tujuannya adalah untuk mengkaji strategi pembangunan nasional dalam mengatasi ketimpangan ekonomi antar daerah dari perspektif ekonomi Islam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang kompleks dan multidimensional, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang masalah yang diteliti. (Pahleviannur et al. 2022). Jenis penelitian kepustakaan dipilih karena Data sekunder dari sumber tertulis, termasuk buku, jurnal, dan makalah resmi pemerintah, digunakan dalam penelitian ini. Metode analisis induktif digunakan untuk mengevaluasi data, yaitu mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian menafsirkan dan mengevaluasinya untuk menghasilkan kesimpulan baru.

Dalam penelitian kepustakaan, peneliti harus memperhatikan kualitas dan keakuratan sumber data yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti harus memilih sumber data yang

relevan dan terpercaya, serta melakukan kritik terhadap sumber data yang digunakan. Selain itu, peneliti juga harus memperhatikan teknik pengambilan data, seperti teknik membaca kritis dan teknik catat-mencatat(Sugiyono 2003). Dalam penelitian ini informasi yang digunakan berasal dari sejumlah sumber, termasuk buku, terbitan berkala, dan catatan resmi pemerintah. Metode analisis induktif digunakan untuk mengevaluasi data, yaitu mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian menafsirkan dan mengevaluasinya untuk menghasilkan kesimpulan baru. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kajian strategi pembangunan nasional dalam perspektif ekonomi Islam guna mengatasi ketimpangan ekonomi antar daerah.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia telah mengimplementasikan beberapa strategi pembangunan nasional untuk mengatasi ketimpangan ekonomi antar daerah. Berikut adalah beberapa strategi yang dilakukan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Rencana ini memuat arah kebijakan nasional tahunan yang bertujuan menjaga kelangsungan pembangunan secara metodis, terorganisir, dan responsif. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung layanan dasar dan pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama rencana tersebut. (National Development Planning Agency (Bappenas) 2020)
2. Program pembangunan infrastruktur prioritas: Untuk periode 2020–2024, pemerintah memiliki lima program pembangunan infrastruktur prioritas: transformasi digital, energi dan ketenagalistrikan, pembangunan infrastruktur perkotaan, infrastruktur, dan pengembangan layanan dasar. (Instruksi Suryadi pada tahun 2022)
3. Pembangunan infrastruktur yang masif dan merata: Selama lima tahun terakhir, infrastruktur Indonesia telah dikembangkan secara masif dan merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga menjadi landasan bagi kemajuan di masa depan. Ketersediaan infrastruktur memberi Indonesia modal yang dibutuhkan untuk tumbuh dari negara berkembang atau dari jatuh ke dalam “perangkap pendapatan menengah” dan menjadi negara maju.”.(Bappenas 2023)
4. Pembangunan infrastruktur yang mendorong konektivitas antar daerah: Membangun infrastruktur yang mendorong konektivitas antar daerah merupakan tujuan jangka

panjang pembangunan nasional dalam rangka mendorong dan memperluas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

5. Menjadikan negara lebih berdaya saing: Menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan mencapai kesejahteraannya bergantung pada kemampuan negara untuk menumbuhkan daya saing yang tinggi. Daya saing Indonesia yang tinggi akan mampu menangkap peluang yang ada dan siap menghadapi tantangan globalisasi. (BPSDM 2004)

Dengan implementasi strategi-strategi tersebut, diharapkan ketimpangan ekonomi antar daerah dapat teratasi dan pembangunan nasional dapat berjalan secara merata dan berkelanjutan. Dalam implementasi strategi pembangunan nasional di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, terdapat beberapa tantangan, hambatan, dan kegagalan yang dihadapi, antara lain:

1. Ketimpangan ekonomi antar daerah: Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi antar daerah, namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal.
2. Kendala pembangunan infrastruktur: Pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu fokus strategi pembangunan nasional di Indonesia masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan pendanaan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, dan keterbatasan jaminan pemerintah yang dapat diberikan pada proyek infrastruktur.
3. Terbatasnya akses dan waktu jelajah wisatawan Hambatan utama terhadap pertumbuhan industri pariwisata Indonesia adalah infrastruktur yang tidak memadai, yang membatasi akses pengunjung dan waktu berlayar.
4. Tidak adanya jaring pengaman sosial yang memadai, akses terhadap prospek ekonomi, dan kesempatan kerja Masalah kurangnya jaring pengaman sosial, kesulitan mengakses prospek ekonomi, dan kurangnya kesempatan kerja harus diatasi di Indonesia.
5. Jumlah maksimum jaminan pemerintah yang tersedia untuk proyek-proyek infrastruktur: Terbatasnya kemampuan pemerintah untuk memberikan jaminan terhadap proyek-proyek infrastruktur menentukan masuknya investasi asing ke Indonesia. (Mashdurohatun 2011).

Meskipun terdapat beberapa tantangan, hambatan, dan kegagalan dalam implementasi strategi pembangunan nasional di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, pemerintah menjaga laju reformasi struktural untuk mendorong pengembangan modal dasar yang kuat untuk pertumbuhan, termasuk sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang adil dan berkualitas tinggi, dan meningkatkan daya saing bangsa. Dalam menghadapi hambatan, tantangan, dan kegagalan dalam strategi pembangunan nasional di Indonesia 10 tahun terakhir, ekonomi Islam dapat memberikan alternatif solusi yang dapat menguatkan bagian-bagian yang menurut Ekonomi Islam harus diperhatikan juga agar memperkuat strategi Pembangunan Nasional yang dapat meminimalisir dan menetralsir Berikut adalah beberapa upaya dari ekonomi Islam dalam menanggulangi hambatan, tantangan, dan kegagalan tersebut (Mubarok 2021):

1. Peningkatan Menangani permasalahan makroekonomi dan penerapan sistem keuangan syariah: Di Indonesia, keuangan syariah kini dikembangkan di sektor pasar modal, non-bank, perbankan, dan dana sosial. Secara makroekonomi, pemerintah dapat meningkatkan operasional dan administrasi sistem keuangan syariah mengatasi ketimpangan ekonomi antar daerah.
2. Pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah: Pendekatan ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan terbatasnya prospek lapangan kerja dan terbatasnya akses terhadap sumber daya keuangan.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dicapai dengan menjamin pemerataan pendidikan dan pelatihan kerja. Pendekatan ini dapat secara efektif mengatasi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja dan terbatasnya akses terhadap peluang ekonomi.
4. Peningkatan akses keuangan melalui pengembangan sistem keuangan syariah: Peningkatan akses keuangan melalui pengembangan sistem keuangan syariah dapat membantu mengatasi kendala pendanaan dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan UMKM.
5. Peningkatan kualitas infrastruktur melalui pembangunan infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah: Peningkatan kualitas infrastruktur melalui pembangunan infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah dapat membantu mengatasi ketimpangan ekonomi antar daerah (Mubarok 2021).

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan, tantangan, dan kegagalan dalam strategi pembangunan nasional di Indonesia 10 tahun terakhir dan mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia secara merata dan berkelanjutan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Indonesia adalah negara dengan Mayoritas Bergama Islam. Agar Strategi Pembangunan Nasional dapat lebih sempurna dapat menjawab ketimpangan ekonomi antar daerah, hendaknya pemerintah juga memperhatikan bagaimana instrument Ekonomi Islam dalam menjawab ketimpangan ekonomi antar daerah. Dalam menghadapi ketimpangan ekonomi antar daerah di Indonesia, strategi ekonomi Islam dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan (Septiani, Fasa, and Suharto 2022). Berikut adalah beberapa strategi ekonomi Islam dalam pembangunan nasional untuk mengatasi ketimpangan ekonomi antar daerah di Indonesia 10 tahun terakhir:

1. Zakat Melalui alokasi harta dari individu yang wajib (muzakki) kepada penerima (mustahik), zakat dapat secara efektif menghilangkan kesenjangan sosial ekonomi. Pemerintah dapat memperkuat pengelolaan zakat dan memperluas penggunaannya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi antar daerah.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat: Kurangnya akses dan peluang kerja pada angkatan kerja dapat diatasi dengan dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia: Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pendidikan dan pelatihan kerja dapat membantu mengatasi masalah kurangnya kesempatan kerja dan akses terhadap kesempatan ekonomi.
4. Peningkatan akses keuangan: Menciptakan sistem keuangan syariah dapat membantu meningkatkan akses keuangan dan membantu mengatasi hambatan keuangan untuk pengembangan usaha mikro, menengah, dan menengah serta infrastruktur.
5. Peningkatan kualitas infrastruktur: Peningkatan kualitas infrastruktur melalui pembangunan infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah dapat membantu mengatasi ketimpangan ekonomi antar daerah.

Dengan mengimplementasikan strategi ekonomi Islam tersebut, diharapkan dapat membantu mengatasi ketimpangan ekonomi antar daerah di Indonesia dan mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia secara merata dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi syariah, temuan penelitian menunjukkan bahwa fokus pembangunan Indonesia selama sepuluh tahun terakhir menjadi tidak relevan. Hal ini disebabkan oleh pemerintah Indonesia yang terus menekankan pembangunan infrastruktur dibandingkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pembangunan nasional yang mengutamakan peningkatan daya saing dan basis sumber daya manusia serta kompetensinya mandiri.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, strategi pembangunan nasional yang diimplementasikan harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan nasional yang mengutamakan peningkatan daya saing serta ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia. (Negara 2013).

Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan akses dan distribusi modal, sehingga daerah-daerah yang tertinggal dapat memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi ekonominya. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat peran bank syariah dan lembaga keuangan mikro merupakan contoh lembaga keuangan syariah.

Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, terutama di daerah-daerah yang tertinggal. Infrastruktur yang berkualitas dapat meningkatkan konektivitas antardaerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dan keberlanjutan.

Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa program pemerintah yang dapat dijadikan sebagai strategi pembangunan nasional untuk mengatasi ketimpangan ekonomi antar daerah. Salah satu program tersebut adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dan Perdesaan. Dengan mengedepankan pemberdayaan sosial dan ekonomi, inisiatif ini berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terdapat inisiatif lanjutan pemerintah antara lain Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, strategi pembangunan nasional harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, diharapkan strategi pembangunan nasional yang diimplementasikan dapat mengatasi ketimpangan ekonomi antar daerah dan mendorong ekspansi ekonomi jangka panjang.

KESIMPULAN

Dalam merumuskan strategi pembangunan nasional untuk menangani ketimpangan ekonomi antar daerah di Indonesia, perspektif ekonomi Islam menyoroti beberapa aspek kunci. Pertama, prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan menjadi landasan utama dalam mengarahkan strategi ini. Fokus utama diberikan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitasnya melalui akses pendidikan yang merata serta pelatihan kerja untuk mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. Distribusi modal yang merata menjadi prioritas berikutnya, memastikan bahwa daerah-daerah terpinggirkan mendapat akses yang sama untuk mengembangkan potensi ekonominya. Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, memastikan adil dan berkelanjutan. Program pemerintah yang ada, seperti PNPM Mandiri, PKH, dan PIP, dapat menjadi landasan strategi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Integrasi sistem keuangan syariah di daerah-daerah tertinggal juga menjadi langkah krusial. Dukungan pada UMKM berbasis syariah menjadi aspek penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Optimalisasi pengelolaan zakat sebagai instrumen yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi juga diperlukan. Dengan penerapan strategi yang memperhatikan prinsip-prinsip syariah ini, diharapkan pembangunan nasional dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi antar daerah di Indonesia sambil menciptakan kesempatan ekonomi yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakatnya.

DAFTAR REFERENSI

- Aulia Mutiara Hatia Putri.2023. “Ekonomi RI Membaik, Ketimpangan Kaya-Miskin Bisa Menurun?”. Cnbcindonesia.com. Di akses pada 11 Oktober 2023 00.23 pada halaman [Ekonomi RI Membaik, Ketimpangan Kaya-Miskin Bisa Menurun? \(cnbcindonesia.com\)](https://www.cnbciindonesia.com)
- Alizain, M R. 2013. *Developing Appropriate Web-Based Writing Learning Materials for Second Semester Students of Grade X in Sma N 1 Sewon in* <https://core.ac.uk/download/pdf/33516301.pdf>.
- Ambarwati, Rita, and Supardi. 2020. *Buku Ajar Manajemen Operasional Dan*.
- Bappenas. 2023. “Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.”
- BPSDM. 2004. “Modul Kebijakan Umum DJBK.” : 1–67. https://simantu.pu.go.id/epel/edok/71aaa_MODUL_1_KEBIJAKAN_UMUM_DJBK.pdf.

- Didik Suryadi.2022.”Upaya Peningkatan Daya Saing Indonesia Melalui Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan”. Kemenkeu.go.id: KPKNL Balik Papan. Di akses pada 10 Oktober 2023 19.05 pada halaman [Upaya Peningkatan Daya Saing Indonesia Melalui Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan \(kemenkeu.go.id\)](https://kemenkeu.go.id)
- Dedy Sasongko.2020.” Strategi Membangun Indonesia Maju”.Kemenkeu.go.id: Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Di akses pada 10 Oktober 2023 21.24 pada halaman [Strategi Membangun Indonesia Maju \(kemenkeu.go.id\)](https://kemenkeu.go.id)
- Eddy Cahyono Sugiarto.2019.” Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Indonesia Maju”. Setneg.go.id. Di akses pada 10 Oktober 20.18 pada halaman [Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Indonesia Maju | Sekretariat Negara \(setneg.go.id\)](https://setneg.go.id)
- Erlina F. Santika.2023. “Ketimpangan Ekonomi di Indonesia Meningkat pada Maret 2023”. Katadata.co.id. Di akses pada 10 Oktober 2023 23.10 [Ketimpangan Ekonomi di Indonesia Meningkat pada Maret 2023 \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id)
- Hardiyanto. 2021. “Perencanaan Pembangunan Solusi Atau Masalah.” : 1–5. <https://jambi.kemenag.go.id/file/pas6876450710139.pdf>.
- Indonesian Bank. 2015. “Tantangan, Arah Kebijakan Dan Prospek Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Maritime Economy* 52(Prospek perekonomian Indonesia secara maritim): 1–52.
- Jaih Mubarak, Khotibul Umam , Destri Budi Nugraheni, Veri Antoni, and Shandy Primandasetio, Kesumawati Syafei. 2018. *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I*.
- Jajang, A et al. 2021. *A Jajang W Etc*.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. 2019. “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.” *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*: 1–443. [https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan Eksyar_Preview.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan_Eksyar_Preview.pdf).
- Mashdurohatun, Anis. 2011. “Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11(Edsus).
- Mubarak, Muhammad Sultan. 2021. “Strategi Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembangunan Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 1(3): 107–14.
- National Development Planning Agency (Bappenas). 2020. “Rpjmn 2020-2024.” *National Mid-Term Development Plan 2020-2024*: 313. <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan...dan.../rpjmn-2015-2019/>.
- Negara, Siwage Dharma. 2013. “Membangun Perekonomian Indonesia Yang Inklusif Dan Berkelanjutan.” *Masyarakat Indonesia* 39(1): 247–62. <https://jmi.ipisk.lipi.go.id/index.php/jmiipisk/article/viewFile/319/190>.

- Nuruddin, A, and D MA. 2009. "Ekonomi Syari'ah." *Cipta Pustaka Media Perintis, Bandung* 5(2): 14.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal et al. 2022. Pradina Pustaka *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Sayekti, Nidya Waras. 2017. "Ketimpangan Ekonomi Dan Kebijakan Pemerataan Pembangunan Di Provinsi Banten." *Jurnal Budget* 2(1): 1–10.
- Septiani, Andini, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto. 2022. "Mengatasi Dan Menyikapi Kesenjangan Sosial Dengan Menggunakan Penerapan Ekonomi Syariah." *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15(1): 140–48.
- Septiarti, S. W. et al. 2017. UNY Press *Sosiologi Dan Antropologi Pendidikan*.
- Sugiyono. 2003. "Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif."
- Suhartono. 2015. "Ketimpangan Dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Daerah Hasil Pemekaran: Studi Kasus Di Provinsi Banten Dan Gorontalo." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 6(1): 33–43.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/154>.
- STIE PASIM.2020. "Pengertian Ilmu Ekonomi Menurut Para Ahli" STIE PASIM.ac.id. Di akses pada 10 Oktober 2023 19.03 pada halaman [Pengertian Ilmu Ekonomi Menurut Para Ahli - STIE PASIM](#)
- Teguh, R, and Sudiadi. 2014. [http://eprints.mdp.ac.id/1208/1/Diktat TRO.pdf](http://eprints.mdp.ac.id/1208/1/Diktat_TRO.pdf) *Teknik Riset Operasional*.
- Tim Pokja SISMENNAS. 2016. *Modul Bidang Studi Sistem Manajemen Nasional*.
<https://adoc.pub/queue/modul-bidang-studi-sistem-manajemen-nasional-sub-bidang-stud.html#>.
- Wibisono, Samuel. 2019. *Matematika Diskrit Edisi 2*.
- Wibowo, Tri. 2017. "Ketimpangan Pendapatan Dan Middle Income Trap." *Kajian Ekonomi dan Keuangan* 20(2): 111–32.
- Yusuf Sukman, Jayadi. 2017. 4 Вестник Росздравнадзора «Эпидемиологическая Безопасность» No Title.